

Siaran Pers SETARA Institute

RILIS DATA KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN (KBB) 2024

REGRESI DI TENGAH TRANSISI

Jakarta, 25 Mei 2025

SETARA Institute kembali merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tahun 2024 di Indonesia, yang telah dilakukan secara konsisten selama 18 tahun terakhir. Data KBB disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap berbagai pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun, yang diperoleh melalui laporan korban dan saksi, jaringan pemantau di berbagai wilayah, serta triangulasi dengan pemberitaan media.

Temuan Umum dan Highlight Peristiwa

Kondisi KBB tahun 2024 menunjukkan **sinyal kuat terjadinya regresi atau kemunduran di akhir pemerintahan Presiden Jokowi dan awal pemerintahan Presiden Prabowo**. Menjelang akhir kepemimpinannya, alih-alih meninggalkan jejak progresi signifikan dalam pemajuan KBB, Presiden Jokowi justru membukukan stagnasi kondisi KBB dalam satu dekade. Tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menjadi gambaran kegagalan negara dalam memastikan terbangunnya ekosistem toleransi. Di satu sisi, transisi pemerintahan menuju Presiden Prabowo juga belum sepenuhnya menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam pemajuan KBB. Masih ditemukannya berbagai peristiwa pelanggaran KBB pasca lahirnya kepemimpinan baru **menunjukkan Presiden Prabowo belum serius dalam mengartikulasikan Asta Cita 8 yang berkomitmen untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama**.

Sepanjang tahun 2024, SETARA Institute mencatat adanya 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023. 159 tindakan di antaranya dilakukan oleh aktor negara, sedangkan 243 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara.

Salah satu faktor yang diduga turut mendorong peningkatan jumlah pelanggaran KBB di tahun 2024 adalah dinamika politik nasional, khususnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari, serta Pilkada serentak pada 27 November. Meskipun penggunaan politik identitas berbasis agama tidak terjadi secara masif seperti pada tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2019), temuan menunjukkan politisasi agama tetap muncul di sejumlah daerah. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap isu KBB juga cenderung menurun menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus pemerintah yang lebih tertuju pada agenda transisi kekuasaan menyebabkan isu pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi kurang mendapat perhatian.

Secara umum, terdapat **tiga highlight** kondisi KBB 2024, **Pertama**, tingginya tindakan intoleransi (73) oleh masyarakat, dan tindakan diskriminatif (50) oleh negara. Angka ini mengalami lonjakan cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2023 dengan tindakan intoleransi (26) dan diskriminatif (23). **Kedua**, maraknya penggunaan pasal penodaan agama dari 15 kasus

pada 2023, angka ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi 42 kasus di tahun 2024. Di antaranya, kasus pendakwaan (7) dan penetapan tersangka penodaan agama (7) dilakukan oleh aparat negara, Kemudian 29 kasus pelaporan penodaan agama oleh masyarakat. **Ketiga**, gangguan terhadap pendirian dan operasionalisasi tempat ibadah. Meskipun jumlah gangguan menurun dari 65 kasus pada 2023 menjadi 42 kasus pada 2024, angka ini masih menunjukkan permasalahan pendirian tempat ibadah belum terselesaikan secara sistemik.

Dari total 159 tindakan oleh aktor negara, sebagian besar berasal dari institusi pemerintah daerah (50 tindakan), diikuti oleh kepolisian (30), Satpol PP (21), serta masing-masing 10 tindakan oleh TNI dan Kejaksaan, dan Forkopimda (6).

Pelanggaran oleh aktor non-negara menunjukkan pola mengkhawatirkan. Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ormas keagamaan (49 tindakan), disusul kelompok warga (40), individu warga (28), Majelis Ulama Indonesia (21), ormas umum (11), individu (11), dan tokoh masyarakat (10). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kontribusi pelanggaran oleh ormas keagamaan meningkat signifikan, menunjukkan kecenderungan menguatnya konservatisme dalam ruang keagamaan, yang kerap kali ditandai oleh penyempitan cara pandang terhadap keberagaman agama dan keyakinan.

Dalam konteks wilayah, jika di tahun 2023 Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak membukukan pelanggaran, di tahun 2024 Jawa Barat kembali membukukan pelanggaran tertinggi dengan 38 peristiwa. Sementara Jawa Timur 234 peristiwa, DKI Jakarta 31 peristiwa, Sumatera Utara 29 peristiwa, Sulawesi Selatan dengan 18 peristiwa, dan Banten dengan 17 peristiwa.

Proyeksi dan Tantangan Kepemimpinan Nasional

Tantangan KBB menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan nasional baru di bawah Presiden Prabowo-Gibran. Tahun 2024 menandai meningkatnya pelanggaran KBB, yang menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara di tengah transisi kekuasaan. Praktik intoleransi dan diskriminasi, baik oleh masyarakat maupun aparat negara, masih marak terjadi, memperlihatkan jarak antara komitmen politik dan implementasi nyata di lapangan. Pemerintahan sebelumnya cenderung mengabaikan isu-isu kebebasan sipil demi fokus pada agenda ekonomi-politik, yang memperburuk persepsi publik terhadap keberpihakan negara dalam isu hak asasi manusia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kesempatan strategis untuk membalikkan tren negatif tersebut melalui kepemimpinan yang menjadikan pemajuan KBB sebagai agenda prioritas. Ini membutuhkan langkah konkret, mulai dari reformasi regulasi seperti revisi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan moratorium pasal penodaan agama, hingga penguatan kapasitas birokrasi dan aparat hukum dalam menangani kasus KBB secara adil. Selain itu, negara harus menunjukkan kepemimpinan moral dan sosial yang tegas dalam mendorong budaya toleransi di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekadar simbolisme politik.

Rekomendasi

Atas berbagai kondisi KBB 2024 yang teruraikan di atas, SETARA Institute merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah progresif dalam mengatasi situasi melemahnya kondisi KBB, diantaranya:

1. Presiden Prabowo Subianto penting untuk menyelaraskan agenda pemajuan KBB dan toleransi menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029;
2. Presiden perlu memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan regulasi strategis seperti Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama dan mempercepat pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagaimana mandat UU No. 15/2019 untuk mengefektifkan penanganan kebijakan diskriminatif;
3. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri agar memastikan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif bagi pemerintahan daerah, dengan menerbitkan kebijakan khusus tata kelola yang inklusif dalam mengelola kemajemukan republik.[]

Narahubung:

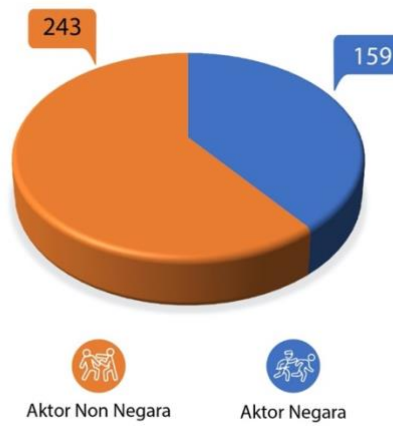
1. Ahmad Fanani Rosyidi, *Peneliti KBB SETARA Institute*, 0857 5533 3657
2. Sayyidatul Insiyah, *Peneliti Rule of Law SETARA Institute*, 0895 3669 15954
3. Halili Hasan, *Direktur Eksekutif SETARA Institute*, 0852 3000 8880

LAMPIRAN

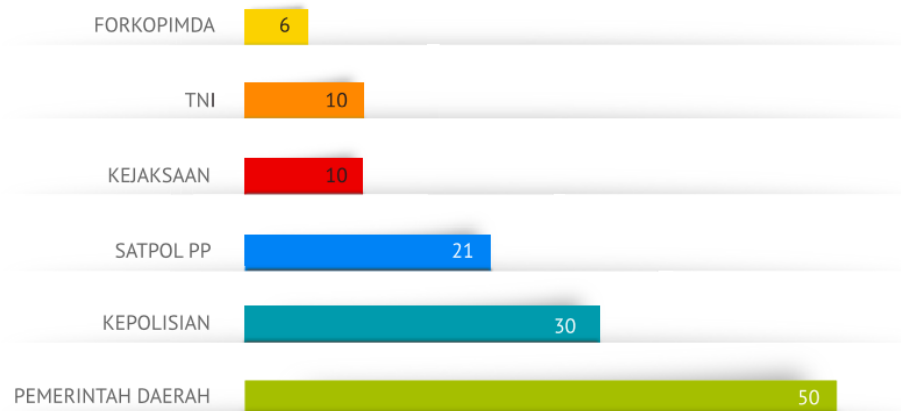
Grafik 1. Perbandingan Jumlah Pelanggaran KBB Tahun 2023-2024



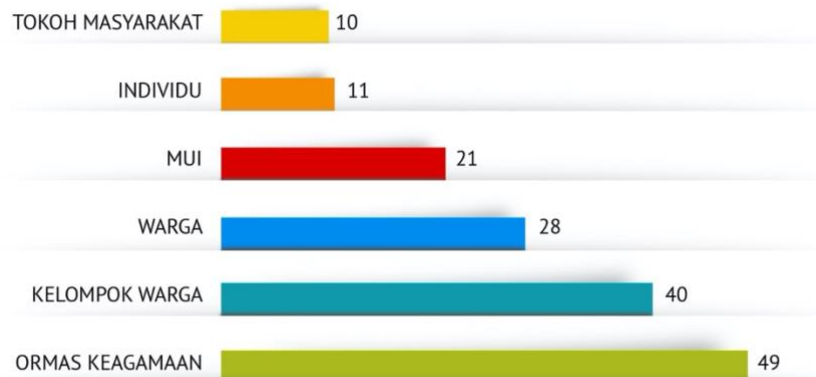
Grafik 2. Tindakan Aktor Negara dan Tindakan Aktor Non Negara



Grafik 3. Enam Tertinggi Aktor Negara



Grafik 4. Enam Tertinggi Aktor Non-Negara



Grafik 5. Tindakan Non Negara terhadap Gangguan Tempat Ibadah



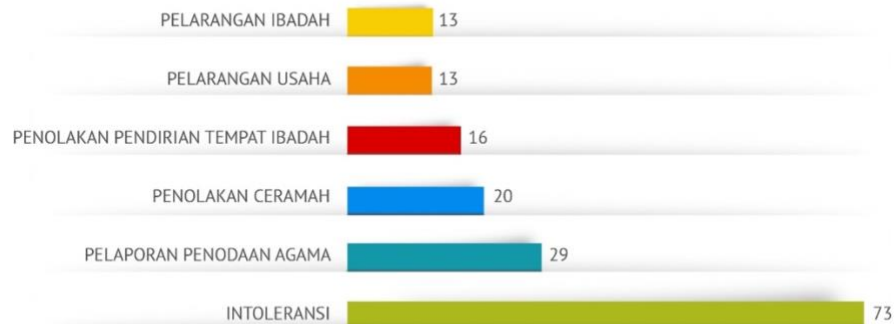
Grafik 6. Tindakan Negara terhadap Gangguan Tempat Ibadah



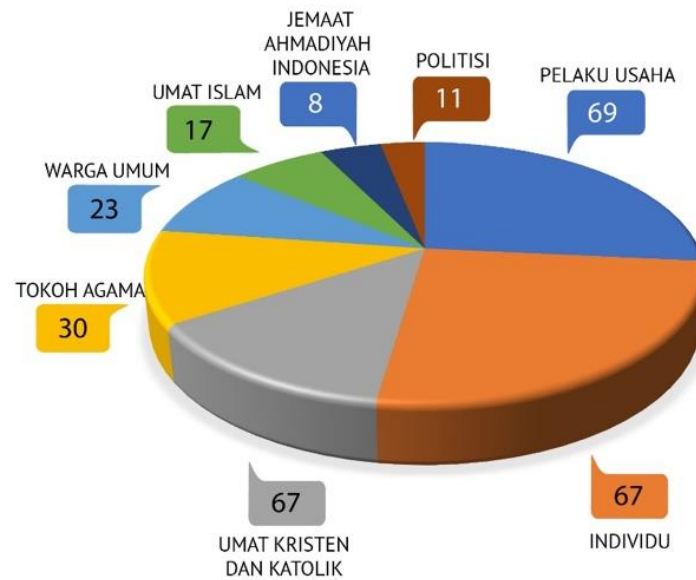
Grafik 7. Enam Tertinggi Bentuk Tindakan Aktor Negara



Grafik 8. Enam Tertinggi Bentuk Tindakan Aktor Non Negara



Grafik 9. Delapan Tertinggi Korban Pelanggaran



Grafik 10. Enam Wilayah dengan Peristiwa Tertinggi

